

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAENDELS DI JAWA 1808-1811

Yoel Kurniawan Raharjo^{1*}

¹Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

*Email: yoelkurniawan@usd.ac.id

Abstract: *This article discusses the policies of Herman Willem Daendels' government in Java between 1808-1811. This research uses historical methods including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results of the research show that Daendels came to Java carrying the banner of the French Revolution. He was sent by Louis Napoleon, Napoleon Bonaparte's younger brother who at the same time occupied the Netherlands. Daendels' main task was to defend Java from British attacks. Although his rule in Java was relatively short for only three years (1808 - 1811) his policies were phenomenal and impressive. Many criticisms came to him because he was considered very cruel and militaristic, but he still built various policies with revolutionaries. One of his phenomenal works is building a posted highway or also known as Daendels Street. Other works include building forts and military defenses, reforming the bureaucracy, and eradicating corruption, also reforming law and justice.*

Keywords: *Policy, Power, Daendels, Java*

Abstrak: Artikel ini membahas mengenai kebijakan-kebijakan pemerintahan kekuasaan Herman Willem Daendels di Jawa antara tahun 1808-1811. Peneliti an ini menggunakan metode historis yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan Daendels datang ke Jawa dengan mengusung panji-panji Revolusi Perancis. Ia diutus oleh Louis Napoleon, adik Napoleon Bonaparte yang pada masa bersamaan menduduki Belanda. Tugas utama Daendels ialah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Meskipun kekuasaannya di Jawa relatif singkat hanya tiga tahun (1808-1811) namun kebijakan-kebijakannya sangat fenomenal dan mengesankan. Banyak kritik datang kepadanya karena dinilai sangat kejam dan militeristik namun ia tetap membangun berbagai kebijakan dengan revolusioner. Salah satu karya fenomenalnya ialah membangun Jalan Raya Pos atau juga dikenal Jalan Daendels. Karya lainnya seperti membangun benteng dan pertahanan militer, mereformasi birokrasi dan memberantas korupsi, serta mereformasi hukum dan peradilan.

Kata Kunci: Kebijakan, Kekuasaan, Daendels, Jawa

PENDAHULUAN

Zaman perubahan Hindia Belanda dimulai dengan tibanya Herman Willem Daendels yang diangkat menjadi Gubernur Jenderal oleh Louis Bonaparte, raja Belanda. Daendels tiba di Jawa pada awal 1808 dengan menumpang kapal Amerika yang berhasil memecah blokade Inggris. Konon, ia seorang Jacobin dan pengagum berat Napoleon sampai mengibarkan bendera Perancis di Batavia ketika Belanda diintegrasikan ke dalam Kekaisaran Perancis. (Lombard, 2008).

Herman Willem Daendels lahir Hattem, Belanda pada tanggal 21 Oktober 1762. Ia anak dari seorang hakim kota di provinsi Gederland, Belanda. Ketika itu Kerajaan Belanda dibawah Raja Willem V dari Dinasti Oranje. Ayah Daendels bernama Burchard Johan Daendels dan ibunya Josina Christina van Tulleken. Daendels merupakan anak kedelapan dari ketiga belas bersaudara lelaki-perempuan, dan hanya empat diantara saudaranya yang bertumbuh dewasa.

Selepas menyelesaikan Pendidikan sekolah di Hattem tahun 1781, Daendels yang diproyeksi menggantikan ayahnya menjadi hakim kota di Hattem melanjutkan studi hukum di Haderwijk. Disini ia bersinggungan dengan gagasan-gagasan ketatanegaraan dan filsafat modern. Menurut Nugroho (2015) semasa kuliah Daendels kepincut dengan ide-ide dan gerakan patriot yang dikumandangkan dosennya. Saat itu upaya untuk mengubah sistem ketatanegaraan tengah gencar dilakukan kaum patriot di Belanda. Mereka terilhami oleh Gerakan kaum Republikan yang menentang sistem monarki di Perancis.

Setelah Daendels muda merampungkan studi hukumnya di Haderwijk dengan tugas akhir berjudul "*De Compensation*" (tentang kompensasi) dengan promotor P.A. Roscam, ia kembali ke kampung halaman untuk menyebarkan ide-ide patriot kepada teman-temannya. Menurut Toer (2005) Ketika di Hattem, Daendels berkecimpung dengan politik lokal dengan kendarannya *Exercitiengenootschap* (perkumpulan untuk latihan). Kebetulan waktu itu di Belanda sedang berlangsung gerakan mempersenjatai warga, terpengaruh oleh revolusi Perancis. Puluhan korps bebas dan perkumpulan latihan dibentuk. Gerakan itulah nanti yang dikenal sebagai kaum Patriot

Bulan Juli 1785 ketika Burchard Johan Daendels meninggal dunia. Cita-cita Daendels

untuk menggantikan ayahnya sebagai hakim kota terbuka lebar. Namun Raja Belanda saat itu, Willem V menolak Daendels untuk menjadi hakim kota karena mengetahui ia adalah seorang patriot yang dapat membahayakannya. Justru Willem V mengangkat seorang Oranje yang loyal terhadap kerajaan.

Tatkala cita-cita Daendels menjadi hakim kota gagal, ketidaksukaan terhadap rezim Raja Willem V dari dinasti Oranje menjadi-jadi. Pemberontakan pun terjadi di Hattem dan Amsterdam. Tanggal 9 mei 1787 Daendels dan Patriot berhasil menumpas pasukan Oranje. Menurut Toer (2005) pasukan Kerajaan membalas dengan menurunkan pasukan kavaleri, artileri, dan dua resimen infanteri. Menghadapi pasukan sekuat itu, Daendels lari ke kota Dunkerque di Perancis.

Kehidupan di Perancis inilah yang nanti mengubah nasib Daendels menjadi Jenderal yang besar dan mahsyur. Toer (2005) menjelaskan tahun 1791 bersama sudaranya Egbert Anthony dan rekan seperjuangannya Jan Gelderman, ia mendirikan firma "Daendels, Gelderman & Co". Lewat firma inilah ia melakukan transaksi senjata dengan penguasa Perancis dan menjalin kontak dengan Menteri Dalam Negeri Perancis Dumouriez yang memberikan jalan untuk lebih dekat dengan kalangan-kalangan revolusioner di Paris.

Perlu diketahui di Eropa sedang terjadi persaingan politik antara Perancis dan Inggris (tentunya Kerajaan Belanda berunding kepada Inggris) dimana Napoleon Bonaparte berusaha menguasai daratan di Eropa dengan melancarkan "Politik Kontinental" dimana seluruh dagangan dari Britania di blokade untuk masuk daratan Eropa. Maka dari itu Napoleon harus sesegera menguasai Kerajaan dibawah Raja Willem V dari dinasti Oranje. Menurut Nugroho (2015) Perancis sangat berkepentingan dengan wilayah Belanda karena wilayah itu menjadi akses paling mudah bagi Inggris menuju daratan Eropa.

Bulan Januari 1795 Daendels Bersama pasukan Perancis menyerbu Kerajaan Belanda atas perintah penguasa Perancis saat itu Napoleon Bonaparte. Pasukannya berhasil menduduki Belanda dan memaksakan perjanjian Traktat Den Haag antara Kerajaan Belanda dan Republik Perancis. Saat itulah, negeri Belanda dibawah kekuasaan Perancis. Adik Napoleon Bonaparte yaitu Louis Napoleon lalu diangkat menjadi penguasa Belanda, untuk kemudian

dijadikan negara bagian prefektorat dari Perancis.

Perubahan pemerintahan ini juga berimbas pada jajahan Belanda di Hindia Timur. Wilayah jajahan di Hindia Timur terkhusus Jawa menjadi perhatian Louis Napoleon. Persaingan politik antara Perancis dan Inggris di Eropa tentu membawa konsekuensi ke Hindia Timur. Jawa harus segera dipertahankan dengan Gubernur Jenderal yang kuat untuk membendung serangan Inggris apabila menyerang. Herman Willem Daendels diutus untuk menjadi Gubernur Jenderal di Jawa. Menurut Marihandono (2006) sebelum dikirim ke Jawa, ia menerima dua tugas utama. Tugas pertamanya yaitu ia harus mempertahankan Jawa dari serangan Angkatan Laut Inggris. Tugas keduanya yaitu ia harus membuat pemerintahan yang bersih daripada pejabat VOC yang terlebih dahulu.

Selama pemerintahannya di Jawa yang cukup singkat dari 14 Januari 1808-16 Mei 1811 (3 tahun 4 bulan) Daendels mampu menjalankan tugas utama tersebut dengan fenomenal dan revolusioner. Meskipun menurut Vlekke (2016) Daendels sebelumnya belum pernah tinggal di timur, tapi tampaknya dia cocok tinggal di Batavia yang busuk dan kotor. Daendels merupakan orang baru yang tahu apa yang dia inginkan dan bertangan besi. Seorang orator revolusioner yang pada hari-hari patriot tumbuh menjadi perwira diktator model Napoleon.

Tujuan artikel ini untuk melihat kebijakan-kebijakan Daendels saat berkuasa di Jawa tahun 1808-1811. Kebijakan itu kemudian dijabarkan ke dalam berbagai bidang; seperti pembangunan infrastruktur berupa jalan raya pos jalan Daendels, pembangunan benteng dan pertahanan militer, reformasi birokrasi dan memberantas korupsi, serta reformasi hukum dan peradilan di Jawa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan riset pustaka. Zed (2004) menjelaskan terdapat 7 langkah riset pustaka yang meliputi (1) pemilihan ide umum topik riset penelitian, (2) pencarian informasi pendukung, (3) penguatan fokus dan ide bahan bacaan, (4) pencarian dan penemuan bahan-bahan pustaka, (5) pengorganisasian bahan pustaka, (6) pengkajian bahan pustaka, dan (7) reorganisasi catatan pustaka.

Pustaka yang dikaji dalam penelitian ini yaitu buku, majalah dan jurnal yang relevan terkait kebijakan pemerintahan Daendels.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Daendels Tiba di Jawa

Sebelum Daendels melakukan pelayaran ke Jawa yang merupakan suatu daerah asing baginya karena belum pernah mengunjungi sebelumnya, ia menerima berbagai instruksi. Menurut Marihandono (2003) tanggal 28 Januari 1807 Daendels menerima serah terima tugas untuk menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda langsung dari Louis Napoleon atas perintah Napoleon Bonaparte. Persiapan pun dilakukan, kemudian tanggal 9 Februari 1807 Louis Napoleon menandatangani instruksi yang harus dilakukan oleh Daendels.

Instruksi tersebut apabila dijabarkan untuk Gubernur Jenderal Koloni dan Wilayah Asia ada 37 Pasal, dan instruksi bagi Gubernur Jenderal untuk membubarkan dan membentuk Pemerintah Tinggi yang baru di Batavia ada 6 Pasal. Karena begitu besar tanggung jawab yang ditanggungnya, Louis Napoleon akhirnya menaikkan pangkat Daendels dari Kolonel Jenderal menjadi Marsekal. Daendels diharapkan menjalankan apa yang sudah digariskan dalam instruksi raja Louis Napoleon kepadanya.

Bulan Maret 1807 Daendels mulai berlayar menuju Jawa. Ia berangkat secara diam-diam agar tidak diketahui Inggris. Perlu diketahui karena hampir semua lautan diblokade Inggris sebagai balasan terhadap Perancis yang melancarkan Politik Kontinental yang memblokade daratan Eropa. Berawal dari Paris, Daendels menempuh jalan darat menuju Cadiz di Spanyol selatan. Dari Cadiz bersama ajudannya kemudian pergi ke Maroko dimana Konsul Perancis memberi sarana untuk menuju Kepulauan Canary. Kepulauan ini berada di Samudra Atlantik di barat Afrika Utara.

Di Kepulauan Canary, Daendels membeli sebuah kapal Amerika bernama Virginia. Toer (2005) menjelaskan selanjutnya ia naik kapal Amerika menuju New York. Mengapa harus menempuh jarak sejauh itu ? karena dalam perang besar Perancis lawan Persekutuan Eropa, Amerika bersikap netral. Mengapa New York ? karena tak didapatkan kapal Amerika yang berlayar ke Jawa. Baru dari New York ia dapat menumpang kapal Amerika ke tujuan, Jawa. Dan itu pun tidak menggunakan namanya sendiri, tapi nama istrinya, Van Vlieden.

Tanggal 1 Januari 1808 Daendels mendarat di Jawa, tepatnya Anyer Banten. Total lama perjalanan dari Eropa menuju Jawa sepuluh bulan lamanya. Dari Anyer, Daendels menempuh jalan darat menuju Batavia untuk menemui Gubernur Jenderal saat itu, Henricus Albert Weise. Menurut Marihandono (2011) setelah menempuh perjalanan tiga hari dari Anyer menuju Batavia, tanggal 4 Januari 1808 ia disambut Komandan Militer Serang PP. Dupuij; saat itu juga menemui Gubernur Jenderal Wiese. Barulah tanggal 14 Januari 1808, Daendels menerima jabatan dari Gubernur Jenderal Wiese. Akhirnya Herman Willem Daendel menjadi Gubernur Jenderal di Jawa baru yang diangkat Louis Napoleon atas restu Napoleon Bonaparte.

Perjalanan dari Anyer menuju Batavia ditempuh dalam waktu tiga hari dan waktu itu musim penghujan. Dalam perjalanan pertamanya di tanah Jawa, Daendels melihat jalan yang dilaluinya sangat sempit, berlumpur serta sangat tidak memadai. Daendels berfikir bagaimana bisa pertahanan Jawa mampu menahan serangan Inggris jika sewaktu-waktu menggempur melihat sarana jalan saja tidak memadai. Ketika Inggris menyerang bagaimana bisa tentara-tentaranya dapat dimobilisasi dengan cepat apabila jalan yang ditempuh dengan waktu relatif lama. Proyek jalan inilah nanti yang akan dibangun Daendels pertama kali ketika kekuasaannya dimulai.

B. Pembangunan Jalan Raya Pos, Jalan Daendels

Tanggal 14 Januari 1808 sesaat setelah Daendels menerima jabatan Gubernur Jenderal dari Wiese, Ia mencanangkan program pertama bagi proyek pertahanan Jawa yaitu membuat jalan yang menghubungkan ujung barat dan ujung timur Pulau Jawa, disamping membangun dua fasilitas dan pangkalan armada laut di Teluk Meeuwen (Ujung Kulon) dan Ujung Manari (Gresik). Daendels menetapkan pembangunan jalan raya ini harus selesai dalam waktu satu tahun. (Marihandono: 2006).

Rute jalan pertama yang dibangun ialah Anyer-Batavia. Pada mulanya, Daendels memerintahkan untuk perbaikan dan pelebaran jalan. Rute ini merupakan jalan pertama kali ketika ia mendarat, dan sudah ada. Awalnya ditempuh dalam waktu empat hari. Setelah diperkeras dan dilebarkan dapat ditempuh dalam sehari. Pekerjaan ini mudah saja karena medannya datar. Hambatan hutan belantara

sepanjang lebih kurang 40 km dapat kesulitan berarti. (Toer: 2005).

Alasan Daendels membangun jalan pos bermula dari Anyer karena dalam perhitungan militernya, Inggris bisa saja mendarat di Anyer. Daerah ini merupakan salah satu pelabuhan tersibuk dan terbesar selain Sunda Kelapa. Hal ini tentu saja sangat diwaspadai Daendels. Untuk menangkal pasukan Inggris secepat mungkin, tentu Daendels perlu sebuah jalan yang dapat ditempuh dengan singkat memobilisasi pasukannya ke Anyer. Sebenarnya Daendels hanya memperkeras dan memperlebar jalan yang sudah ada.

Daendels lalu melanjutkan pembangunan jalan tersebut dari Batavia ke Buitenzorg, dilanjutkan menuju Priangan kemudian Karangsembung. Jadi jalan dari Batavia hingga Karangsembung dibangun dengan biaya Pemerintah. Akan tetapi, menurut Marihandono (2006) selanjutnya dari Karangsembung hingga Surabaya diserahkan sepenuhnya kepada para Bupati, akibat defisit anggaran Pemerintah. Hal ini telah disetujui ketika Daendels melakukan pertemuan dengan para Bupati di Semarang pada bulan Juli 1808.

Rocher (2011) menjelaskan bahwa dari aspek strategi, jalan raya pos yang menyusuri pesisir utara Jawa dari ujung ke ujung merupakan upaya Daendels yang paling hebat. Dimanapun Inggris mendarat, ia memungkinkan untuk mengirim dengan sangat cepat infanteri, kavaleri, dan artileri yang mampu mengusir mereka kembali ke laut. Hendro (2014) menjelaskan sejak Daendels berkuasa sebagai Gubernur Jenderal pada awal abad ke-19, kota-kota di Jawa mulai berubah sebagai titik-titik simpul jaringan transportasi dan komunikasi yang sangat efektif untuk kepentingan militer dan ekonomi. Pembangunan jalan raya oleh Daendels yang dikenal sebagai *Groote Postweg* merupakan salah satu infrastruktur penting bagi perkembangan kota-kota modern di Jawa.

Jalan raya pos alias *De Groote Postweg* atau *Grand Route de la Poste* memiliki pos-pos pergantian kuda setiap jarak lima *paal* (1 *paal* = 1,6 km). Mirip dengan jasa layanan kuda pengangkut surat Pony Express yang menghubungkan pantai timur dan pantai barat Amerika Serikat pertengahan tahun 1800-an. Jalan raya ini merupakan cetak biru Pulau Jawa modern Republik Indonesia. Pusat-pusat industri di Pulau Jawa tumbuh disepanjang jalan raya pos. (Rocher dan Santosa: 2013).

Jalan raya pos yang berhasil dibangun sebenarnya bukan hanya mendukung mobilitas militer saja seperti yang dikehendaki Daendels, namun juga berdampak luas, seperti mendukung penegakan hukum dengan memperlancar pengangkutan saksi dan tawanan yang diadili. Selain itu dari sudut sosial ekonomi, jalan ini bermanfaat untuk pengangkutan produk hasil bumi, intensifikasi penggarapan tanah; terbukti dengan munculnya tanah-tanah partikelir dan semakin cepatnya hubungan pos. Apabila sebelumnya ada jalan ini, jarak antara Batavia dengan Surabaya ditempuh 2 minggu di musim panas dan 3 minggu di musim penghujan; dengan selesainya jalan raya pos maka seminggu dua kali kereta pos dapat diberangkatkan baik dari Batavia maupun Surabaya. Hal ini menyebabkan cepatnya integrasi dan penyatuan Jawa dibawah satu sentral kendali kekuasaan yaitu Batavia. (Marihandono: 2006)

C. Membangun Benteng dan Pertahanan Militer

Daendels memusatkan pertahanan Jawa di Batavia. Ia membangun tiga benteng untuk melindungi Batavia dari serangan Inggris. Benteng pertama terletak di Ancol, benteng ini memiliki tiga meriam disisi kanan dan kiri dan keduanya mengarah ke pantai. Lalu Daendels membangun benteng kedua di Weltevreden. Tiga ratus Meriam dan sejumlah garnisun melindungi benteng ini. Apabila benteng ini jebol, Daendels masih punya benteng ketiga yang lokasinya di Meester Cornelis; inilah benteng terkuat di Batavia tahun 1810. (Trihanggoro, 2015).

Benteng ketiga di Meester Cornelis dibangun Daendels dengan perhitungan militer yang matang. Rocher (2011) menjelaskan Daendels beranggapan bahwa cara bertahan yang paling bagus adalah membuat sebuah garis pelindung diselatan Batavia dengan peluang bagi pasukan untuk mundur ke Buitenzorg. Benteng Meester Cornelis akan menjadi pusatnya.

Pertahanan tiga lapis dengan tiga benteng di Batavia yang dibangun di Ancol, Weltevreden, dan Meester Cornelis dibuat untuk menghambat pasukan Inggris jika menyerang. Strateginya apabila pasukan Inggris berhasil lolos melalui Sungai Ciliwung dan sebuah selokan besar di Meester Cornelis, Daendels dan pasukannya akan menghabisi dari benteng Meester Cornelis. Menurut Rocher dan Santosa (2013) Daendels

melihat terdapat tanah rawa dengan ruapan racun dan pohon-pohon upas di utara Meester Cornelis yang akan membunuh pasukan Inggris yang mendarat di pesisir Batavia terlebih dahulu. Ketika itu orang Eropa menyadari wilayah rawa di daerah tropis dapat memicu demam yang mematikan. Dorleans (2006) menyebut lingkungan di Batavia sangat tidak sehat dan dijuluki "*het graf des Hollanders*" kuburan bagi orang Belanda.

Pertahanan di luar Batavia, Daendels membangun benteng di Gresik, Anyer di teluk Meeuwen, dan Yogyakarta. Untuk di Yogyakarta, Daendels mengganti nama benteng Restenburg menjadi Vredenburg. Pergantian nama tersebut memiliki arti dari "peristirahatan" menjadi "kedamaian" karena fungsinya untuk melindungi dan menghormati pejabat sipil yang tinggal disana.

Kebijakan Daendels dibidang pertahanan militer lainnya yaitu mendirikan rumah sakit, barak militer serta pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Pada tahun 1808 Daendels di Semarang membangun bengkel amunisi berkaliber besar dan laboratorium kimia dengan nama *Proyektieel Fabriek* (PF). Sedangkan di Surabaya merupakan pabrik konstruksi senjata artileri bernama *Artillerie Constructie Winkel* (ACW) untuk memasok persenjataan militernya.

Pada sisi pasukan kemiliteran, Daendels membentuk beberapa kesatuan militer modern yang direkrut dari bumiputera. Daendels juga mereorganisasi struktur militer dan menaikkan gaji tentara. Ia sadar dengan menaikkan gaji akan meningkatkan daya juang tentaranya dan ini merupakan salah satu faktor terpenting. Gaji yang diberikan kepada tentaranya sesuai dengan jabatan kemiliterannya. Marihandono (2015) menjelaskan Daendels menetapkan tujuh kategori penggajian. Pertama staf umum berjumlah 47 orang menerima 1.200-15.000 ringgit. Kedua infanteri berjumlah 11 orang menerima 480-6.500 ringgit. Ketiga kompi artileri berjumlah 200 orang menerima 48-2.500 ringgit. Keempat staf resimen kavaleri berjumlah 6 orang menerima 3.500-7.000 ringgit. Kelima kompi elit berjumlah 199 orang menerima 60-2.500 ringgit. Keenam kompi prajurit Eropa berjumlah 13 orang menerima 472-2.500 ringgit. Ketujuh kompi bumiputera berjumlah 173 orang menerima 48-288 ringgit.

Pasukan bumiputera mulai dibentuk 1 September 1808 yang terbagi dalam dua jenis pasukan yaitu Jayasengkar dan Prangwedana. Isnaeni (2015) menjelaskan pasukan

Jayasengkar dari bumiputera pilihan terbaik yang cerdas, dan pandai dari tiap prefektur atau provinsi di Jawa. Pasukan ini mendapatkan pelatihan militer senjata (bayonet, sangkur, pistol) dan kuda berkualitas. Sedangkan Prangwedana merupakan pasukan bumiputera yang berasal dari Mangkunegaran. Mereka berjumlah 1.100 orang dan langsung berada dibawah Gubernur Jenderal. Daendels membentuk pasukan Prangwedana menurut model Eropa. Ia membagi pasukan ini menjadi satu batalyon infanteri dengan 4 kompi, 2 kompi pemburu, 2 pasukan artileri berkuda, dan 2 skuadron kavaleri.

Pasukan Prangwedana atau Legiun Mangkunegaran sendiri oleh Daendels dilatih ala militer Eropa dan dipersenjatai. Pasukan ini rencananya akan digunakan Daendels sebagai pasukan cadangan dalam menghadapi Inggris. Menurut Rocher dan Santosa (2013) sebagai salah satu satuan militer, Legiun Mangkunegaran berkembang menjadi organisasi yang terkuat dan termodern pada awal abad 19. Ketika Daendels berkuasa, ia meresmikan Legiun Mangkunegaran sebagai satuan militer ala *Grande Armee Napoleon* tahun 1808.

Daendels yang merupakan ahli angkatan darat, dalam perkembangannya memberikan perhatian lebih besar pada penguatan tentara yang jumlahnya delapan sampai sepuluh ribu orang ketika tiba di Jawa. Dorleans (2006) menjelaskan pada November 1808 tentara yang terdiri dari 3.700 tentara Eropa dan 11.520 tambahan dari penduduk pribumi. Pada April 1811 tentara imperialis menjadi 1.774 orang kelompok terbaik terdiri dari atas budak dari Bali dan Makassar. Pada saat penaklukan Jawa akhir 1811, Lord Minto terpesona atas besarnya instalasi militer yang disebutnya sebagai “penempatan pasukan yang sangat besar dan mengagumkan”.

D. Reformasi Birokrasi dan Memberantas Korupsi

Satu dari dua mandat khusus yang dititahkan Louis Napoleon kepada Daendels adalah membenahi administrasi Hindia Belanda. Memang sebelum Daendels berkuasa, praktek korupsi dan suap menyuap marak merajalela baik di kalangan pejabat pemerintahan kompeni maupun para bupati bumiputera. Daendels lalu menerapkan sistem kekuasaan “sentralisasi” dengan memudahkan tujuan

memudahkan pengawasan dan mengurangi tindak korupsi.

Tanggal 1 September 1808 kekuasaan Nicholas Engelhard sebagai Gubernur Pantai Timur Laut Jawa yang berkedudukan di Semarang dihapuskan. Daendels berpandangan bahwa wilayah pantai timur laut Jawa merupakan wilayah yang terlampau luas dan tidak efisien. Ia juga menerima laporan jika anggaran untuk mengelola pemerintahan pantai timur laut Jawa sangat besar namun tidak ada pertanggung jawabannya. Menurut Isnaeni (2015) kemudian Daendels membagi wilayah pantai timur laut Jawa menjadi Sembilan prefektur yaitu Tegal, Pekalongan, Semarang, Rembang, Jepara, Gresik, Surabaya, Pasuruan, dan Sumenep. Pejabat pemimpin prefektur disebut prefek, jabatan ini setara dengan residen. Setiap prefektur dibagi menjadi beberapa distrik atau kabupaten yang dipimpin bupati dari kaum pribumi. Baik prefek maupun bupati diangkat dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal.

Selain merombak birokrasi di pemerintahan daerah, Daendels juga merombak birokrasi di pemerintahan tinggi dengan menempatkan orang-orang kepercayaannya. Disini ia sebagai Gubernur Jenderal memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur dan memberi wewenang hingga pejabat eselon terbawah. Pegawai-pegawai Belanda dan bupati—bupati dijadikan pegawai pemerintah. Pegawai pemerintah diberi pangkat militer dan digaji menggunakan uang. Penggunaan uang untuk penggajian untuk menghindari pungutan-pungutan liar dari rakyat bawahnya. Daendels juga membenahi buku besar atau laporan keuangan Pemerintah Hindia Belanda.

Langkah-langkah lain yang dilakukan Daendels untuk memberantas korupsi yaitu larangan bagi semua pegawai pemerintah untuk berdagang, larangan menerima atau mengirim parcel dan paket, ketepatan berat dan harga komoditi dagang, peraturan tentang penyusutan komoditi dagang, serta peraturan tentang pembalakan hutan. (Marihandono: 2011). Daendels juga memberikan sanksi bagi penyelewengan hasil bumi dan hutan akan dikenakan sanksi berat. Apabila terbongkar akan dikenai sanksi meliputi denda, kehilangan jabatan atau bahkan hukuman mati. Mereka yang kedapatan melakukan kecurangan senilai lebih dari 3.000 ringgit atau senilai satu bulan gaji Ketua Dewan Hindia Belanda akan dihukum mati dengan cara ditembak. Sanksi ini

diterapkan dengan tujuan membuat jera pejabat saat itu.

Daendels memiliki pandangan yang luar biasa terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan bawahannya, namun justru ia melakukan hal-hal yang kontradiktif. Menurut Vlakke (2008) Daendels menikmati gaji yang sangat besar saat itu sebesar 130.000 golden setahun dan ditambah tunjangan-tunjangan lainnya. Meskipun sudah memiliki pendapatan yang besar, ia masih berkeluh kesah bahwa dibayar kecil. Daendels juga menyalahgunakan kekuasaannya untuk merampas sebuah rumah peristirahatan di Buitenzorg bagi dirinya sendiri lalu dijual kepada pemerintah. Ia juga menolak kompromi dengan siapapun kecuali bagus untuk kepentingannya.

E. Reformasi Hukum dan Peradilan di Jawa

Menurut Vlekke (2008) Dalam karya apologetiknya *Staat der Balandasche Oost Indische Bezzittingen*, Daendels mengkritik tajam organisasi dan praktik peradilan di Jawa. Ia menyebut “perlakuan terhadap orang tahanan di penjara Batavia mengerikan dan mereka bukanlah orang yang berhati lembut”. Beberapa pengadilan yang sebelumnya didirikan kompeni tidak dapat menangani banyak kasus yang masuk dan terjadi penyalahgunaan kekuasaan pengadilan.

Sebelum Daendels tiba di Jawa hanya ada dua pengadilan tinggi di Jawa yang berada di Semarang dan Batavia. Pengadilan tinggi di Semarang membawahi daerah Cirebon di sebelah barat dan Banyuwangi di sebelah timur. Menurut Triyana (2015) keadaan ini jelas menyulitkan karena seringkali hakim menangani perkara ke daerah yang jaraknya ratusan kilometer seperti hakim Semarang yang harus ke Banyuwangi. Pengadilan di Batavia juga misalnya yang jauh dari pedalaman membuat banyak perkara tak terselesaikan secara tuntas.

Banyaknya permasalahan tersebut membuat Daendels menambah jumlah pengadilan di Jawa dengan mendirikan pengadilan khusus (*vredegericht*) pada tingkat kabupaten dan pengadilan negeri (*landgericht*) pada tingkat provinsi. Menurut Triyana (2015) dengan didirikan pengadilan sampai tingkat kabupaten, penanganan perkara jauh lebih ringkas. Perkara-perkara kecil seperti pencurian langsung bisa langsung ditangani oleh pengadilan khusus yang ditangani oleh para bangsawan rendah dan dikepalai bupatinya.

Daendels juga memberikan pemisahan kelompok penduduk yang berbeda dalam urusan peradilan. Vlakke (2008) menjelaskan setiap kabupaten, diatas kabupaten, setiap prefekturat; pengadilannya sendiri yang terdiri atas orang Indonesia dengan dua orang Eropa di pengadilan-pengadilan prefekturat. Pengadilan itu hanya mengadili orang Jawa saja yang terlibat. Semua kasus yang berkenaan dengan orang asing yaitu Eropa, China, Arab, atau Indonesia yang bukan Jawa akan ditangani oleh Dewan Peradilan di Batavia, Semarang, dan Surabaya.

Selain itu Daendels juga membenahi rujukan hukum yang ada pada pengadilan di Jawa. Triyana (2015) menjelaskan rujukan hukum tersebut dibagi dalam tiga kategori yaitu pengadilan bagi pribumi dekat huum adat Jawa dan syariat Islam. Pengadilan bagi warga timur asing dan warga Eropa dengan menggunakan hukum Eropa.

KESIMPULAN

Herman Willem Daendels berkuasa di Jawa dengan mengusung panji-panji revolusi Perancis yang diutus Louis Napoleon atas restu Napoleon Bonaparte untuk menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sosoknya kerap diposisikan sebagai tokoh antagonis dalam sejarah Indonesia karena dianggap kejam dan tanpa kompromi. Namun dibalik kepribadiannya, ia membangun Jawa dengan sangat menggagumkan. Daendels kekuasaannya relatif singkat hanya tiga tahun antara 14 Januari 1808 - 16 Mei 1811, namun berhasil menjalankan misi yang digariskan Napoleon.

Kebijakan Pemerintahan Daendels seperti membangun Jalan Raya Pos yang membentang 1100 km, membangun benteng pertahanan militer, mereformasi birokrasi dan memberantas korupsi, serta mereformasi hukum dan peradilan di Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dorleans, Bernard. (2006). *Orang Indonesia dan Orang Perancis*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia
- Hendro, Eko Punto. (2014). Perkembangan Morfologi Kota Cirebon dari Masa Kerajaan hingga akhir Masa Kolonial. *Paramita*, 24 (1) : 17-30
- Isnaeni, Hendri F. (2015). Reformasi Atas Nama Revolusi. *Historia*. 23 (2) : 41-43

- (2015). Sepuluh Fakta Jalan Daendels dari Anyer ke Panarukan. *Historia*. 23 (2) : 48-51
- (2015). Alasan Bermula di Anyer dan Berakhir di Panarukan. *Historia*. 23 (2) : 52-53
- (2015). Sang Marsekal Menaklukan Raja-Raja Jawa. *Historia*. 23 (2) : 54-58
- Lombard, Denys. (2008). *Nusa Jawa Silang Budaya: Batas-Batas Pembaratan*. Jakarta : Gramedia
- Marihandono, Joko. (2011). Upaya Pemberantasan Korupsi di Hindia Timur. *Makalah disajikan dalam diskusi VOC: Pedagang atau Penjajah*. Jakarta : Fadli Zon Library
- (2008). Mendekonstruksi Mitos Pembangunan Jalan Raya Cadas Pangeran 1808: Komparasi Sejarah dan Sejarah Lisan. *Makalah disajikan dalam Peringatan 70th Prof Dr RZ Leirissa*. Depok : Dept Sejarah FIB Universitas Indonesia
- (2006). Daendels Effort to Abolish Corruption. *Paper disajikan dalam Seminar 35th Studi Belanda di Indonesia*. Depok : Prodi Belanda FIB Universitas Indonesia
- (2006). Mega Proyek Marsekal Guntur. *Makalah disajikan dalam Seminar Lisan V dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Pariwisata*. Depok : Jakarta : Galeria Nasional
- (2003). Daendels dalam Naskah dan Cerita Rakyat. *Makalah disajikan dalam Seminar Internasional Lisan IV*. Jakarta
- Nugroho, Yudi Anugerah. (2015). Anak Hattem Penyambung Lidah Napoleon. *Historia*. 23 (2) : 34-37
- Rocher, Jean & Santosa, Iwan. (2013). *Sejarah Kecil Indonesia-Perancis 1800-2000*. Jakarta : Kompas
- Rocher, Jean. (2011). *Perang Napoleon di Jawa 1811*. Jakarta : Kompas
- Ricklefs, M.C. (1998). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: UGM Press
- Toer, Pramoedya Ananta. (2005). *Jalan Raya Pos Jalan Daendels*. Jakarta : Lentera Dipantera
- Triyana, Bonnie. (2015). Atas Nama Hukum Napoleon Bonaparte. *Historia*. 23 (2) : 44-47
- Trihanggoro, Hendaru. (2015). Langkah Militer Daendels. *Historia*. 23 (2) : 38 – 40
- Vlekke, Bernard H.M. (2008). *Nusantara*. Jakarta : Gramedia
- Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Obor